

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrachman, Hamidah. et al. *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan ke-1. (Yogyakarta: Deepublish, 2020).
- Atmadja, I Dewa Gede. dan I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. (Malang: Setara Press, 2018).
- Djulaeka dan Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019).
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Cetakan ke-1. (Depok: Prenadamedia Group, 2018).
- Fuady, Munir. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*. Cetakan ke-1. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005).
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHPA*. Cetakan ke-20. (Jakarta: Rineka Cipta, 2016).
- _____. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cetakan ke-4. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Jainah, Zainab Ompu. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cetakan ke-1. (Tangerang: Tira Smart, 2018).
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*. Cetakan ke-2. (Malang: UIN Maliki, 2010).
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*. (Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014).
- Manao, Disiplin F. dan Dani Elpah (ed). *HAKIM: Antara Pengaturan dan Implementasinya*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-14. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1998).
- Mulyadi, Lilik. *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana, 2020).
- Mustofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim: Edisi Kedua*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013).
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*. (Bogor: Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010).

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 1997).
Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. *Modul Surat Dakwaan*. (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019).

B. Jurnal

Gulo, Nimerodi dan Ade Kurniawan Muharram. "Disparitas dalam Penjatuhan Pidana". *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 47 No. 3 Tahun 2018.
Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam penjatuhan pidana". *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 7 No. 1 Tahun 2018.
Nurhafifah dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 66, Th. XVII Tahun 2015.

C. Peraturan perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
_____. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)*.
_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)*.
_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)*.
_____. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1528)*.
Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*.
Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana*.

D. Internet

Anonim. "Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana". www.indonesiare.co.id, 24 April 2020.

- _____. "Tugas dan Wewenang Hakim". *www.suduthukum.com*, 25 Agustus 2020.
- Karoen, Rizkisyah dan Wikan Sinatrio Aji. "Substansi yang Terlupakan". *www.pji.kejaksaan.go.id*, 1 Desember 2020.
- Kartika, Herlina (ed). "Polri: Jumlah kecelakaan lalu lintas meningkat 3% sepanjang 2019". *www.nasional.kontan.co.id*, 8 Agustus 2020.
- Redaksi Rakyat Maluku. "Menelusuri Jejak Permainan Pasal di PN Ambon". www.rakyatmaluku.com, 26 Juli 2020.